



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

Tahun Sidang	: 2015 - 2016.
Masa Persidangan ke-	: V (lima).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan	: 1. Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara; 2. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia; dan 3. Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia.
Hari/Tanggal	: Rabu, 01 Juni 2016.
Pukul	: 13.00 WIB – Selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Teuku Riefky Harsya, M.T./Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Kh, S.sos/Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Penyampaian Masukan terkait Pendidikan Tinggi; 2. Penyampaian Hasil Mukernas BEM Nusantara dan BEM Seluruh Indonesia; 3. Penyampaian hasil Mukernas FL2MI dan masukan permasalahan Pendidikan Tinggi; dan 4. Lain-lain.
Hadir	: 27 orang dari 54 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir dari Mahasiswa	: Ketua BEM Nusantara; BEM Seluruh Indonesia; dan Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia (FL2MI).

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 13.10 WIB oleh Teuku Riefky Harsya, M.T./Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar ketua rapat, dilanjutkan pemaparan dari BEM Nusantara, BEM Seluruh Indonesia dan Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia (FL2MI) serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi paparan dan kepedulian terhadap pendidikan tinggi dari BEM Nusantara, BEM Seluruh Indonesia dan FL2MI mengenai hasil-hasil dari Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) BEM dan FL2MI.

2. BEM Nusantara, BEM Seluruh Indonesia dan FL2MI mengusulkan dan menyampaikan aspirasi kepada Komisi X DPR RI sebagai berikut:
- 1) Mendesak Kemenristekdikti RI agar memperluas akses pendidikan tinggi terutama akses bagi mahasiswa tidak mampu.
 - 2) Mengusulkan anggaran pendidikan tinggi dan BOPTN meningkat atau minimal tetap sebagaimana tahun sebelumnya.
 - 3) Menolak kenaikan UKT dengan mempertimbangkan perekonomian dalam negeri yang tengah lesu dan mengusulkan penetapan peraturan mengenai transparansi UKT dan sistem keringanan, yang diatur secara umum oleh Kemenristekdikti RI dalam perundang-undangan, guna menjamin kepastian hukum bagi mahasiswa, orang tua mahasiswa, dan pihak - pihak yang berkepentingan lainnya.
 - 4) Mendesak penghapusan terhadap Pasal 9 Permenristekdikti No.22 Tahun 2015 mengenai penarikan sumbangan lain oleh institusi/perguruan tinggi terhadap mahasiswa seleksi jalur mandiri.
 - 5) Mendesak Kemenristekdikti RI mengaktifkan kembali beasiswa BBP-PPA & PPA pada setiap tahun anggaran dengan jumlah yang selalu naik setiap tahunnya atau setidaknya-tidaknya tetap dari tahun lalu.
 - 6) Menolak segala bentuk usaha komersialisasi dan liberalisasi pendidikan tinggi dalam bentuk Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum dengan dalih menuju World Class University.
 - 7) Mendesak Kemenristekdikti RI untuk membuat peraturan yang mengatur kepastian adanya unsur mahasiswa di dalam Majelis Wali Amanat (MWA).
 - 8) Mendesak Kemenristekdikti RI menyelesaikan permasalahan Beasiswa Bidik Misi yang tidak bisa menerima Mahasiswa Baru yang tidak mampu (Kasus di IPB yang mengalami penurunan Beasiswa Bidik Misi semula pada tahun 2013 mendapatkan kouta 1200 terus mengalami penurunan hingga tahun 2016 hanya mendapat kouta 370).

III. PENUTUP.

Rapat ditutup pada pukul 14.50 WIB.

KETUA RAPAT,



TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T.